

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSPARANSI  
INFORMASI KEUANGAN DAERAH VIA WEBSITE**  
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015)

**ARTIKEL**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH:**  
**RESTI FEBRIYA NINGSIH**  
**1303480/2013**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2018**

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via  
Website**  
(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015)

**Resti Febriya Ningsih**  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang  
Jalan Prof. Dr. Hamka UNP Air Tawar Barat  
Email : [restifebriyaningsih26.rfn@gmail.com](mailto:restifebriyaningsih26.rfn@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research aims to find new evidence about the factors that effect the tranparency of local financial information via the website. Based on the rules related to the disclosure of public information, as a practice of good governance,all government units are obliged to give financial information to the public transparently. One of the media to deliver such information is through the website. Based on previous literature and research reviews, the authors used six factors that allegedly influenced the transparency of financial information via the website, these factors are the ratio of PAD, the size of local government, regional spending, the ratio of debt financing, and quality of financial statement. This study examines the transparency of local financial information on the website for a sample of 141 local goverments based on disclosure and accesibility to the information, and run two test models are logistic regression and multiple linear regression. The study using logistic method found that the rasioPAD, the size of local government, regional spending, the rasio of debt financing, dan quality of*

*financial statement does not effect the disclosure of local financial information via website. Then, the research using multiple regression method found that only the size of local government having a significant positive effect on the accessibility of local financial information via the website, whereas other factors had no significant effect.*

**Keyword :** *Transparency, disclosure, accessibility, financial information, local government, website.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar belakang masalah**

Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi menjadi alat yang penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pegawai pemerintah (Albalate, 2012). Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: kesediaan dan aksesibilitas dokumen; kejelasan dan kelengkapan informasi; keterbukaan proses; dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten, 2006:73)

Pentingnya transparansi keuangan dan kinerja badan publik pemerintah semakin ditegaskan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada pasal 9 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik yang dimaksud adalah informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait serta informasi mengenai laporan keuangan. Pada pasal 7 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik juga ditegaskan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Transparansi keuangan dan kinerja dapat dilakukan melalui *website*. Puspita dan Martani (2012) menyebutkan alasan pentingnya transparansi keuangan dan kinerja melalui *website* karena biaya yang relatif lebih murah ketika menggunakan teknologi serta kemudahantingkat aktivitas entitas ekonomi dibanding ketika dilakukan dengan manual dan konvensional (Bondon dan Escobar, 2005). Pengungkapan informasi keuangan melalui *website* dinilai efisien dan efektif dalam meningkatkan derajat transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi asimetri informasi antar pejabat publik dengan masyarakat (World Bank, 2003 dalam Mya dan

Komarrudin, 2014). Keseriusan pemerintah pusat untuk mendorong seluruh pemerintah daerah (kabupaten dan kotamadya) di Indonesia mewajibkan transparansi keuangan melalui *website* tersebut ditandai dengan keurnya Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang penyediaan menu TPA (transparansi pengelolaan anggaran) yang memuat 12 dokumen terkait pengelolaan anggaran pada *website* resmi pemerintah daerah (Agustin, 2014)

*Website* dan teknologi berbasis web sering dianggap sebagai bagian penting dari setiap *e-government* (Yavus dan Welch, 2014). Berdasarkan hal tersebut, internet dapat mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Styles dan Tennyson (2007) menjelaskan bahwa media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara *online* adalah internet. Dengan menggunakan internet, publikasi laporan keuangan menjadi lebih cepat dan mudah, sehingga dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

Pemerintah daerah di Indonesia hampir seluruhnya sudah memiliki *website* resmi. Namun, pemanfaatannya oleh pemerintah belum maksimal. Sebagai contoh, riset Agustin (2014) menemukan bahwa kesungguhan pemerintah kabupaten maupun kotamadya di propinsi Sumatera barat untuk memanfaatkan menu transparansi pengelolaan anggaran (TPA) masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tidak lengkapnya dokumen yang sediakan, menu TPA yang sulit diakses,, hingga rendahnya konsistensi pengungkapan setiap tahunnya.

Selain itu, juga terdapat keberagaman dalam ketersediaan dan keteraksesan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal tersebut disebabkan belum adanya regulasi yang menjadi standar dalam mengungkapkan laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Pengungkapan informasi daerah di internet adalah informasi yang tidak ditutupi baik dalam bentuk laporan keuangan, informasi non-keuangan maupun informasi lainnya yang

dibutuhkan publik mengenai hasil aktivitas pemerintah.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan suatu daerah otonom dari potensi yang dimiliki suatu daerah dan dana lainnya yang disahkan berdasarkan undang-undang yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah otonom. PAD tinggi yang dimiliki oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Menurut Christiaensens (1999) kinerja yang tinggi merupakan sinyal yang baik dari manajemen publik. Pemerintah daerah yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et.al.* (2005) dan Medina (2012) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah tersebut.

Ukuran pemda adalah besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah. Menurut Laswad *et al* (2005), ukuran pemda dinilai dari total aset suatu pemerintah daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Syafitri, 2012). Semakin besar total aset maka akan semakin besar sumber daya yang digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih baik sehingga diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang lebih baik juga. Hasil penelitian yang dilakukan Medina (2012) menunjukkan bahwa ukuran pemda berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemda.

Kompleksitas pada pemerintahan bisa diartikan sebagai kondisi dimana baik secara langsung maupun tidak langsung pemerintahan dipengaruhi oleh beragam faktor dengan karakteristik yang berbeda. Kompleksitas pemerintahan dihitung menggunakan jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Martani dan Annisa (2012) menambahkan bahwa populasi penduduk yang lebih besar berarti pemerintah harus memberikan pelayanan publik yang jauh lebih juga kepada masyarakatnya. Dengan demikian penduduk yang besar akan meningkatkan kompleksitas

pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Semakin besar populasi penduduk maka semakin besar pula tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya dikarenakan pemerintah pada dasarnya berfungsi sebagai abdi masyarakat. Penelitian Rora (2010) dan Hilma (2010) menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Semakin tinggi belanja daerah, semakin tinggi pula tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, seharusnya semakin tinggi pula keinginan pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi pelayanan pada *website* pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadek dkk (2015) menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah.

Rasio pembiayaan utang (*leverage*) dilihat dari sejauh mana pemerintah daerah menggunakan dana yang dipinjam untuk membiayai aset yang dimiliki (Sinaga dan Prabowo, 2011). Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan semakin besar rasio pembiayaan utang pemda maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan semakin ketat. Pengawasan yang ketat oleh kreditor akan berdampak pada semakin baiknya kinerja keuangan pemda. Semakin baiknya kinerja keuangan pemda maka semakin besar tuntutan untuk melakukan pengungkapan. Hasil penelitian Laswad dkk (2005) dan Rahman dkk (2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap keuangan pemerintah daerah secara sukarela melalui internet.

Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kualitas

laporan keuangan diukur dengan opini laporan keuangan suatu pemda. Apabila pemda memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP), maka hal itu menandakan laporan keuangan disajikan sangat baik. Pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan yang baik akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan daerah melalui internet untuk menunjukkan sinyal yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring penggunaan teknologi informasi pada saat ini sudah sangat pesat yaitu internet, peneliti belum melihat pemerintah memaksimalkan peran internet dalam pengungkapan informasi keuangan pada *website* resminya. Peneliti ingin menguji kembali secara empiris pada variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel bebas, dalam mempengaruhi pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website* sebagai variabel terikat. Penelitian ini dilakukan pada *website* resmi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera dengan meneliti informasi keuangan tahun 2015. Peneliti mengambil objek penelitian di Sumatera karena adanya peningkatan jumlah *website* yang dimiliki oleh pemerintah daerah di pulau Sumatera, dimana pada periode penelitian sebelumnya yang menggunakan informasi keuangan tahun 2014, jumlah *website* pemerintah daerah yang tersedia sebanyak 123 pemda. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 144 pemda. Namun, pemerintah daerah dianggap masih kurang memperhatikan *website* resminya atau hanya sekedar memenuhi kewajiban mempunyai *website* serta masih terlihat memilih-milih informasi yang ingin diungkapkan yaitu informasi yang dianggap aman atau informasi yang tergolong non keuangan. Selain itu, Sumatera merupakan salah satu pulau yang mendominasi kasus korupsi, terpidana korupsi baik politisi, pejabat negara, maupun swasta sepanjang tahun 2001-2015 (Koran Sindo, edisi 06-04-2016). Hal ini terjadi karena sumber daya baik manusia maupun fiskal terpusat di Sumatera. Ini menandakan bahwa kurangnya transparansi dari pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat; dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan

dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penelitian ini menguji secara spesifik tentang pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan dan melihat sejauh mana sikap transparan dari pemerintah daerah dalam mempublikasi informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada situs resmi pemerintah daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh Pendapatan Asli daerah, Ukuran Pemda, Kompleksitas Pemerintahan, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah via *website*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera Tahun 2015)”**.

## **KAJIAN TEORI**

### ***Agency Theory***

Teori keagenan (*agency theory*) menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Rora dan Dwi (2012) adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) mendelegasikan /memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan prinsipal. Pendelegasian terjadi ketika pihak prinsipal memilih pihak agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Lupia & Mc Cubbins, 2000). Di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010; Abdullah, 2012). Dalam penelitian ini, teori keagenan menghubungkan antara pemerintah yang memiliki otoritas atas suatu daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan masyarakat.

Hubungan antara pimpinan pemerintahan dengan masyarakat disebut dengan hubungan agensi (Banker dan Paxton, 1987). Masyarakat selaku prinsipal memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Sedangkan pemerintah daerah selaku agen mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk laporan

keuangan terkait dengan penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan oleh masyarakat.

Prinsipal dan agen masing-masing memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungannya dan tidak ada alasan untuk mempercayai agen akan selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal. Hubungan keagenan dapat memunculkan adanya *agency problem* berupa asimetri informasi. Pemerintah daerah selaku pihak yang memegang informasi lebih banyak akan cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat, sehingga terkadang masyarakat menerima informasi tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengawasi seluruh tindakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, akan timbul biaya agen dalam rangka memberikan keyakinan pada principal (Godfrey, 2009). Biaya keagenan harus ditanggung oleh pemerintah sebagai usaha untuk memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat. Biaya keagenan yang timbul akibat adanya asimetri informasi oleh Jensen dan Meckling (1976) dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. *Monitoring Cost*, yaitu biaya yang timbul untuk mengawasi perilaku agen.
- b. *Bonding Cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa ia akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.
- c. *Residual Loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

#### **Signalling Theory**

Teori pensinyalan (*signalling theory*) dari perspektif publik menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanat oleh masyarakat berkeinginan menunjukkan sinyal yang baik kepada masyarakat. Pemerintah mendapatkan tekanan dari masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan pencapaian-pencapaian pemerintah. Teori pensinyalan dapat membantu pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal) dalam mengurangi asimetri informasi yaitu dengan cara pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat melalui pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, dan pengungkapan yang lebih lengkap.

Teori pensinyalan pada pemerintahan dapat dianalogikan dengan pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal. Pemerintah

adalah pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola kekayaan masyarakat. Pemerintah bertanggungjawab memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya. Internet merupakan media yang paling efektif bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan sinyal positif kepada masyarakat. Informasi atau sinyal yang disampaikan pemerintah dapat berupa laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalian intern, pengungkapan yang lebih lengkap, dan penjelasan yang lebih detail dalam *website* (Puspita dan Martani, 2012). Pemerintah daerah dapat pula memberikan informasi prestasi dan kinerja keuangan sebagai petunjuk bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat rakyat. Manfaat yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah tidak hanya berhasil menjalankan amanat rakyat melainkan juga mendapatkan citra positif dari masyarakat bahwa harapan mereka telah berhasil dijalankan oleh pemerintah daerah serta memberikan sinyal bahwa pemerintah daerah turut mendorong akuntabilitas. Selain itu masyarakat juga dapat mengakses informasi keuangan dengan cepat dan mudah terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi.

#### **Transparansi**

Salah satu hal yang menjadi perhatian bagi masyarakat adalah kemudahan dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prasyarat akuntabilitas administratif kepada publik. Transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik dapat mengurangi ketidakpastian dan membantu mencegah korupsi oleh aparat pemerintah (*Asian Development Bank*, 1999 dalam Arifianto, 2005).

#### **Pengungkapan Informasi Keuangan di Website Pemerintah Daerah**

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi. Menurut Evan (2003) dalam Suwardjono (2005), pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan informasi keuangan di *website* merupakan pengembangan dari teori

pengungkapan sukarela. Pengungkapan informasi keuangan di *website* sebagai bentuk praktek cerminan inisiatif pemerintahan untuk lebih transparan dalam pengelolaan organisasinya. Pengungkapan sukarela di *website* pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk nyata terbukanya pengelolaan kinerja dan keuangan daerah kepada *stakeholder*, khususnya masyarakat dengan cara yang mudah dan biaya yang murah.

### **Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah**

Menurut Bandariy (2011) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan berbagai pihak pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi keuangan daerah. Menurut Hehanussa (2015) aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Menurut Apriliani,dkk (2015) aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Sedangkan Menurut Mustofa (2012) aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Maka dari itu, suatu pemerintah daerah hendaknya meningkatkan aksesibilitas 30 laporan keuangannya, serta memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh informasi dengan mudah. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya tidak sekedar hanya menyampaikan laporan keuangannya kepada pihak DPRD saja akan tetapi memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

### **Pengembangan Hipotesis**

Pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah untuk dijadikan sebagai pendapatan secara otonomi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah memiliki tingkat material yang membuat pemerintah daerah lebih memilih untuk membatasi akses informasi mengenai pendapatan asli daerah kepada masyarakat (Craven & Marston, 1999). Pemda yang memiliki PAD tinggi akan menunjukkan kepada

para *stakeholdersnya* bahwa pemda telah menghasilkan kinerja yang tinggi. Kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik (Christiaensens, 1999). Pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik pula. Sedangkan penelitian Craven dan Marston (1999) menunjukkan bahwa Pemda yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela seperti *voluntary internet based disclosures* dan akan memilih membatasi pengungkapan informasi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1a: Rasio PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H1b: Rasio PAD berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Ukuran pemda adalah besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah. Suatu pemerintahan daerah yang berukuran besar umumnya memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar. Ukuran pemda yang dalam penelitian ini diprosikan dengan total aset. Total aset merupakan sumber daya yang digunakan entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas. Semakin besar jumlah aset maka akan semakin besar sumber daya yang bisa digunakan untuk melakukan pengungkapan yang lebih besar. Menurut Debrecnyet *et al.* (2002), semakin besar ukuran pemda maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh pemda bila mengungkapkannya melalui media internet. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2a: Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H2b: Ukuran pemda berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Kompleksitas pemerintahan diprosikan dengan jumlah penduduk suatu daerah. Banyaknya jumlah penduduk merupakan gambaran dari besarnya penyediaan layanan publik yang akan diterima oleh pemerintah daerah. Menurut penelitian Lestiani (2008), besarnya penduduk mencerminkan besarnya

kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar tuntutan akan pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintahnya mengingat fungsi pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Sedangkan penelitian Ingram (1984) menunjukkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan (dihitung menggunakan jumlah penduduk) akan memberikan dorongan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengungkapan laporan keuangannya. Semakin besar jumlah penduduk akan meningkatkan layanan terhadap publik. Meningkatnya layanan publik akan menambah kompleksitas operasional pemerintahan.

Menurut Kadek *et al* (2015), tingkat kompleksitas yang tinggi mendorong terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka dari itu pemerintah daerah selaku *agent* mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat atau *principal*. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H3a: Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H3b: Kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Merujuk kepada hal ini, seharusnya semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, semakin tinggi juga keinginan pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan pada *website* pemda. Apabila Pemda mampu melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat maka artinya Pemda memiliki kinerja yang tinggi. Sedangkan menurut Christiaens (1999), kinerja yang tinggi merupakan sinyal dari manajemen publik yang baik. Jadi dapat dianalogikan bahwa semakin

besar belanja daerah maka semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi pelayanan yang dilakukan Pemda. Penelitian yang dilakukan oleh Rora (2013) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4a: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H4b: Belanja daerah berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Styles & Tennyson (2007) menjelaskan bahwa dampak dari pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk pengeluaran-pengeluaran saat ini terletak pada kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan dan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun, utang tidak boleh lebih besar dari jumlah modal yang dimiliki. Hubungan keagenan antara pemerintah pusat (kreditur) dan otoritas daerah memberikan dampak pada besarnya tingkat pengungkapan. Pengungkapan informasi keuangan melalui media tradisional maupun lainnya seperti internet dapat memfasilitasi kreditur untuk mengawasi kinerja pemerintah (Zimmermen, 1977; Ingram, 1984; Gore, 2004). Selain itu, pemda juga dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan dalam memenuhi kebutuhan informasi kreditor. Semakin tinggi rasio pembiayaan utang maka seharusnya semakin baik pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Penelitian Laswad dkk (2005) dan Rahman dkk (2013) menunjukkan bahwa rasio pembiayaan utang berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan pemda secara sukarela melalui internet. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5a: Rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H5b: Rasio pembiayaan utang berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

Menurut Styles dan Tennyson (2007), secara umum pengukuran kualitas pelaporan dan pengungkapan pada sektor pemerintah adalah *GFOA's Certificate of Achievement* program (Evans dan Patton, 1983; Evans dan Patton, 1987; Giroux dan McLelland, 2003). Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan adalah opini audit yang dilihat atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini

audit secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP menyajikan laporan keuangan yang baik dan akan cenderung melakukan publikasi laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan sinyal kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, opini audit selain WTP dapat menimbulkan konotasi atau persepsi publik akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pemerintah cenderung menutupi informasi keuangannya. Penelitian Handayani (2010) menunjukkan bahwa tingkat penyimpangan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan, maka pemerintah daerah cenderung untuk menutupi informasi yang dimiliki, sehingga tingkat pengungkapan menjadi lebih rendah. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hilmi dan Martani (2012) yang menyatakan bahwa tingkat penyimpangan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6a: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan dalam *website*.

H6b: Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan dalam *website*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan dengan variabel dependen, yaitu pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah. Sampel yang digunakan dipilih berdasarkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi : (1) Seluruh Seluruh Pemda di Sumatera yang diaudit oleh BPK TA 2015 (2) Tidak tersedianya data berupa Neraca dan LRA pada Laporan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian

Keuangan (3) *Website* pemda tidak tersedia dan tidak dapat diakses (4) Pemerintah Daerah yang teridentifikasi sebagai *outlier*. Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 141 pemerintah daerah. Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana datanya berupa laporan keuangan pemerintah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan situs resmi pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan model penelitian yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007), dan Medina (2012) yang terdiri dari dua model yaitu analisis regresi logistik dan analisis regresi berganda. Model yang pertama menggunakan model regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah bentuk khusus regresi yang diformulasikan untuk memprediksi dan menjelaskan sebuah variabel kategori biner sebagai variabel dependen (Hair et al., 2009). Regresi logistik digunakan karena variabel terikatnya berupa *dummy variabel*. Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Yurisca dan Tri, 2011).

Model penelitian yang pertama bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan (ada atau tidaknya) data informasi keuangan daerah yang dipublikasikan pada situs resmi pemerintah daerah. Adapun persamaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Model I :

$$IKDdisclosure = \alpha + \beta_1.PAD + \beta_2.UP + \beta_3.KP + \beta_4.BD + \beta_5.RPU + \beta_6.KLK + e.....(1)$$

Model penelitian kedua menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah teknik statistik yang umum digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen (Hair et al., 2009). Model penelitian yang kedua ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas informasi keuangan pada *website* Pemda. Adapun persamaannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Model I :

$$IKDakses = \alpha + \beta_1.PAD + \beta_2.UP + \beta_3.KP + \beta_4.BD + \beta_5.RPU + \beta_6.KLK + e.....(2)$$

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

UP : Ukuran Pemda

KP : Kompleksitas Pemerintahan

BD : Belanja Daerah

RPU : Rasio Pembiayaan Utang



KLK : Kualitas Laporan Keuangan  
e : Koefisien error

## HASIL PENELITIAN

### Model 1 Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah

Menilai *overall fit model* terhadap data-data yang tersedia adalah langkah pertama untuk menguji kelayakan atas seluruh model. *Omnibus test* (lampiran 1) dilakukan untuk menilai apakah model secara keseluruhan cocok (fit) dengan data yang tersedia. Pada model ini diperoleh nilai sig 0,000 yang menunjukkan bahwa model yang dibentuk signifikan dan cocok dengan data.

#### Koefisien Determinasi (*Nagelkerker R Square*)

Koefisien determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel-variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Nilai ini dapat dilihat dari nilai (*Nagelkerke R Square*) dengan cara membagi nilai *Cox & Snell Square* dengan nilai maksimumnya.

Pada tabel koefisien determinasi (lampiran 1) menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,397 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen adalah sebesar 39,7%, sedangkan sisanya 60,3% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Atau secara keseluruhan variabel pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan prediksi pengungkapan informasi keuangan daerah sebesar 39,7%.

#### *Homes and Lemeshow Test*

*Homes and Lemeshow Test* digunakan untuk menilai kelayakan keseluruhan dari suatu model regresi. Suatu model dinyatakan layak jika memiliki nilai  $p > 0,05$ . Jika  $\text{Sig} > 0,05$  maka model regresi logistik tepat. Namun, jika  $\text{Sig} < 0,05$  maka model regresi logistik tidak tepat.

Dari hasil pengujian *Homes and Lemeshow* (lampiran 1), diperoleh nilai *Chi Square* sebesar 3,157 dengan nilai sig sebesar 0,924. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai sig lebih besar dari nilai alpha ( $0,924 > 0,05$ ), artinya tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Hal

ini berarti model regresi logistik dikatakan dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya.

#### Menilai Akurasi Model (*Classification Table*)

*Classification Table* digunakan untuk melihat seberapa baik prediksi model penelitian. Untuk model yang sempurna *overall percentage* akan bernilai 100% .

Pada tabel *Classification Table* (lampiran 1) menunjukkan observasi yang sesungguhnya. Menurut prediksi, pemerintah daerah yang mengungkapkan informasi keuangan di *website* adalah 32 pemerintah daerah, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mengungkapkan informasi keuangan daerah di *website* adalah sebanyak 2 pemerintah daerah. Maka ketetapan model ini adalah 6,3%. Dan menurut prediksi, pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangan di *website* adalah sebanyak 109 pemerintah daerah, sedangkan observasi sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang tidak mengungkapkan informasi keuangan di *website* adalah sebanyak 108 pemerintah daerah. Maka ketetapan model ini adalah 99,1% Secara keseluruhan akurasi model adalah 78%.

#### Model Regresi yang Dihasilkan (*Variables In The Equation*)

*Variables In The Equation* digunakan untuk menunjukkan hasil pengujian koefisien regresi logistik atas model 2 penelitian. Nilai B menunjukkan koefisien dari setiap variabel bebas yang diuji. Sementara nilai Exp (B) menunjukkan besarnya kemungkinan adanya pengungkapan informasi keuangan pada setiap pemda.  $\text{Sig} < 0,05$

### Model II Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Dari tabel *one-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (lampiran 2) diatas dapat terlihat bahwa hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* untuk variabel aksesibilitas sebesar 1,216 dengan signifikan 0,104 dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

##### Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas, maka dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). VIF adalah estimasi seberapa besar multikolinearitas meningkatkan varian pada suatu koefisien estimasi sebuah variabel. Jika nilai VIF < 10 maka terbebas dari multikolinearitas.

Dari tabel hasil uji multikolinearitas (lampiran 2) diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas kurang dari 10 dan *tolerance value* berada diatas 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara sesama variabel bebas dalam model regresi yang dibentuk.

### Uji Heteroskedastisitas

Pengujian adanya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan metode *glejser*. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas (lampiran), dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi >  $\alpha$  0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

### Uji Kelayakan Model

#### F-Test (Uji Signifikansi Serentak)

Uji signifikansi serentak digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Jika Prob (F-Stat) <  $\alpha$ , maka model diterima, dan jika Prob (F-Stat) >  $\alpha$ , maka model ditolak.

Dari hasil pengujian F-Test (lampiran 2), diperoleh nilai F sebesar 2,461 dengan nilai sig sebesar 0,027. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai sig lebih kecil dari nilai alpha ( $0,027 < 0,05$ ), hal ini berarti model diterima.

#### Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel-variabel independennya.

Pada tabel hasil uji R<sup>2</sup> (lampiran 2) menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,059 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen adalah sebesar 5,9%, sedangkan sisanya 94,1% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain diluar model penelitian ini. Atau secara keseluruhan variabel pendapatan asli daerah,

ukuran pemerintah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan dapat menjelaskan prediksi pengungkapan informasi keuangan daerah sebesar 5,9%.

## PEMBAHASAN

### Model 1 Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah

Hipotesis pertama menguji pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Adapun variabel PAD diukur dengan menggunakan perbandingan antara total PAD dengan total realisasi pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan tabel *Variable in the Equation* (lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki koefisien regresi 3,389 dan nilai signifikansi 0,382. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis 1a ditolak.

Laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada *principal* (Godfrey, 2007). Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini didukung oleh penelitian Laswad et al. (2005) yang mengungkapkan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah publikasi laporan keuangan. Adapun PAD merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi PAD maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeckly dan Eka (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Dapat diduga bahwa perbedaan hasil tersebut karena adanya perbedaan subjek penelitian antara penelitian ini dengan penelitian Jeckly dan Eka (2014). Adapun Jeckly dan Eka (2014) menggunakan subjek hanya pemerintah provinsi saja. Namun hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspita & Martani (2012) dan juga Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016). Hasil penelitiannya yaitu rasio

PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hipotesis yang kedua menguji pengaruh ukuran pemda terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Adapun variabel ukuran pemda diukur dengan menggunakan Logaritma Natural total aset suatu pemda. Berdasarkan *Variable in the Equation* (lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa ukuran pemda memiliki koefisien regresi 0,727 dan nilai signifikansi 0,304. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis 2a ditolak.

Berdasarkan *signalling theory*, laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada *principal* (Godfrey, 2007). Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun ukuran pemda diukur dengan menggunakan total aset pemda. Aset merupakan salah satu akun dari laporan keuangan yaitu Neraca. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran pemda maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Martani et al. (2014), Mya dan Komarudin (2013), Medina (2012), Rora (2012), Sanchez et al. (2012) dan Styles dan Tennyson (2007) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasan perbedaan hasil penelitian diduga karena perbedaan proksi ukuran pemda. Martani et al. (2014) menggunakan Logaritma natural dari belanja sebagai proksi ukuran pemda. Adapun penelitian Mya dan Komarudin (2013), Medina (2012), dan Rora (2012) dilakukan pada tahun penelitian yang berbeda yaitu dengan menggunakan pengamatan pada *website* pemda sebelum tahun 2012. Sementara pada 9 Mei 2012 telah terbit Instruksi Mendagri No. 188.52/1797/SJ mengenai transparansi anggaran daerah. Namun hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad et al. (2005), Munoz dan Bolivar (2015) dan Agus Tubels & Dya Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa ukuran pemda tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hipotesis yang ketiga menguji pengaruh kompleksitas pemerintahan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Adapun variabel kompleksitas pemerintahan diukur dengan menggunakan total populasi penduduk suatu Pemda. Hasil pengujian di tabel *Variable in the Equation* (lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan memiliki koefisien regresi 0 dan nilai signifikansi 0,404. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu hipotesis 3a ditolak.

Hasil Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012), Rora (2012), Kadek (2015) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasan perbedaan hasil penelitian diduga karena penelitian Medina (2012), dan Rora (2012) dilakukan pada tahun penelitian yang berbeda yaitu dengan menggunakan pengamatan pada *website* pemda sebelum tahun 2012. Namun hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Tubels & Dya Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hipotesis yang keempat menguji pengaruh belanja daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Adapun variabel belanja daerah diukur dengan menggunakan Logaritma realisasi belanja suatu pemda. Hasil pengujian pada tabel *Variable in the Equation* (lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa belanja daerah memiliki koefisien regresi -1,872 dan nilai signifikansi 0,260. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis 4a ditolak.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rora (2012) dan Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasan yang dapat diduga adalah masih banyaknya pemerintah daerah yang bersikap abai terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hipotesis yang kelima menguji pengaruh rasio pembiayaan utang terhadap pengungkapan

informasi keuangan daerah. Adapun variabel rasio pembiayaan utang diukur dengan menggunakan perbandingan kewajiban dengan ekuitas suatu Pemda. Berdasarkan tabel *Variable in the Equation* (lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa rasio pembiayaan utang memiliki koefisien regresi 0,035 dan nilai signifikansi 0,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis 5a ditolak. Dan hasil pengujian ini secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laswad *et al* (2005), dan Mya & Komarudin (2013) yang menyimpulkan bahwa rasio pembiayaan utang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasan perbedaan hasil penelitian diduga karena penelitian Mya dan Komarudin (2013) menggunakan proksi yang berbeda yaitu Logaritma natural perbandingan total kewajiban dengan total aset. Sedangkan penelitian Laswad *et al* (2013) menyatakan bahwa beban utang yang tinggi sangat diperhatikan oleh pemerintah di New Zealand, karena mereka menganggap pelaporan informasi keuangan di internet merupakan sarana yang potensial untuk memfasilitasi pemantauan oleh kreditur. Oleh karena itu, rasio pembiayaan utang yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Medina (2012), Styles & Tennyson (2007) dan Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hipotesis yang keenam menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Adapun variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan Opini Laporan Keuangan suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP mendapatkan skor 1 sedangkan yang mendapatkan Opini Non WTP mendapatkan skor 0. Dan hasil pengujian di tabel *Variable in the Equation* (lampiran 1) dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki koefisien regresi 0,256 dan nilai signifikansi 0,537. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengungkapan informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis 7a ditolak.

Berdasarkan *signalling theory*, laporan keuangan merupakan salah satu sinyal informasi manajemen kepada *principal* (Godfrey, 2007). Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun kualitas laporan keuangan merupakan cerminan kesesuaian laporan keuangan Pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Opini terbaik yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti bahwa pemerintah daerah telah menyelenggarakan laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SAK serta memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin baik Opini Laporan Keuangan maka seharusnya semakin baik pula pengungkapan informasi keuangan daerah. Namun hasil pengujian secara statistik gagal membuktikan hipotesis tersebut.

Hasil penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Groff dan Pitman (2004), Mya dan Komarudin (2013), Agus Tubels & Dyah Purwanti (2016) yang menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

## **Model II Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah**

Rasio PAD dihitung berdasarkan total PAD dibandingkan dengan total pendapatan. Merujuk pada hasil uji regresi berganda (lampiran 2), PAD tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah karena nilai sig lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,970. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1b ditolak untuk model penelitian aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rora (2010), Medina (2012) dan Agus Tubels (2016) yang menunjukkan bahwa rasio PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela dari keseluruhan model pengungkapan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia.

Berdasarkan hasil regresi berganda (lampiran 2), hipotesis 2b diterima untuk model aksesibilitas informasi keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan melihat nilai koefisien

regresi sebesar 3,716 dengan nilai sig lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran pemda memiliki pengaruh signifikan positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi daerah, karena nilai sig lebih kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Styles & Tennyson (2007). Mereka menemukan bahwa ukuran pemerintah lokal di Amerika Serikat berpengaruh positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan (CAFR) pada situs. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki total aset besar, secara langsung akan memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengakses informasi keuangan pada situs resminya. Hal ini disebabkan karena semakin besar jumlah aset, semakin besar pula sumber daya yang dapat dialokasikan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam mengembangkan situs resminya untuk menjadi lebih baik. Sebuah situs dikatakan lebih baik apabila informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersedia dan mudah dijangkau serta memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk mengakses informasi tersebut.

Merujuk pada hasil regresi berganda (lampiran 2), hipotesis 3b ditolak karena nilai sig kompleksitas pemerintahan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,476. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel kompleksitas pemerintahan tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Laswad *et al* (2005) yang menyatakan bahwa kompleksitas pemerintahan memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah. Internet merupakan fenomena kehidupan urban/perkotaan yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi dan keberagaman manusia yang luas dibanding dengan daerah sekitarnya. Hasil penelitian Laswad *et al* (2005) membuktikan bahwa pemerintah daerah cenderung memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kota-kota yang memiliki penduduk yang tinggi dan beragam untuk mengakses informasi keuangan pada situs resminya.

Berdasarkan hasil regresi berganda (lampiran 2) hipotesis 4b ditolak untuk model aksesibilitas informasi keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan melihat nilai sig belanja daerah lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,398.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rora (2012) dan Agus Tubels (2016) yang menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah. Alasan yang dapat diduga adalah masih banyaknya pemda yang bersikap abai terhadap pengungkapan informasi keuangan di situs resminya.

Merujuk pada hasil regresi berganda (lampiran 2), hipotesis 5b ditolak karena nilai sig rasio pembiayaan utang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,683. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa variabel rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Pemerintah daerah yang rasio pembiayaannya lebih tinggi cenderung akan membatasi akses pengguna ke informasi keuangan pada situs resminya. Pembatasan akses akan memberikan dampak bahwa pemerintah daerah kurang transparan atas informasi-informasi yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan penggunaan utang yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaannya akan memberikan sinyal kinerja pemerintah daerah yang rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Styles & Tennyson (2007), Medina (2012) dan Agus Tubels (2016) yang menyatakan bahwa rasio pembiayaan utang tidak berpengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

Berdasarkan hasil regresi berganda (lampiran 2), hipotesis 6b ditolak untuk model aksesibilitas informasi keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan melihat nilai sig kualitas laporan keuangan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,068. Adapun variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan Opini Laporan Keuangan suatu Pemda. Semakin baik kinerja manajemen pemerintah daerah seharusnya semakin baik pula pengungkapan laporan keuangannya. Adapun kualitas laporan keuangan merupakan cerminan kesesuaian laporan keuangan Pemda dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Opini terbaik yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti bahwa pemerintah daerah telah menyelenggarakan laporan keuangannya sesuai dengan SAP dan SAK serta memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa

variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan Agus Tubels (2016) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang sejauh mana faktor-faktor seperti Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah yang dilihat berdasarkan pengungkapan dan aksesibilitas informasi keuangan daerah pada situs resminya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera tahun 2015

Hasil pengujian model satu dengan regresi logistik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemda, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan daerah.

Hasil pengujian model dua dengan regresi berganda menunjukkan bahwa ukuran pemda memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, dan kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aksesibilitas informasi keuangan daerah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis memiliki keterbatasan berupa subjektivitas dalam menilai variabel aksesibilitas informasi keuangan daerah yang terdiri dari 9 indikator.
2. Faktor-faktor yang diuji belum sepenuhnya menggambarkan transparansi informasi keuangan daerah.
3. Pengukuran variabel publikasi laporan keuangan pemda dengan menggunakan variabel *dummy* tanpa memperhatikan jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan dan

tingkat kemudahan dalam mengakses laporan keuangan tersebut.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Melakukan *cross check* agar dapat diketahui kesamaan dalam penilaian indeks aksesibilitas informasi keuangan daerah.
2. Menguji variabel-variabel lain seperti Dana Alokasi Umum (DAU). Struktur pemerintahan, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat popularitas *website* pemerintah daerah, dan kebutuhan pengguna informasi.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan skala poin untuk mengukur variabel publikasi laporan keuangan pemda melalui internet dengan memperhatikan penilaian terhadap jumlah laporan keuangan yang dipublikasikan dan tingkat kemudahan dalam mengakses laporan keuangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriansyah, Rahmad D dan Haryanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2013.
- Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada *Website* Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI)*. Yogyakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta. BPK RI.
- Bandariy, Himmah. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah. Jurnal: Univ.Diponegoro*, (2011) h. 1-28
- Banker, R. D., Patton, J. M. 1987. *Analytical agency theory and municipal accounting: An Introduction and an application*. Research in governmental and nonprofit Accounting 3 (Part B), 29-50
- Christina. 2013. *Pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian daerah, rasio pembiayaan hutang, belanja daerah, dan tipe pemerintahan daerah terhadap*

- pelaporan keuangan pemerintah daerah. Tesis.
- Godfrey, Jayne *et al.* 2010. *Accounting Theory 7th Edition*. Jakarta: John Wiley.
- Hehanussa, Salomi J. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon*. 2nd Cbam Vol.2 No 1. (2015) h. 82-91
- Hilmi, Amiruddin Z dan Dwi Martani. 2012. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-23 September 2012.
- Hudoyo, Yacoeb Triandy dan Amir Mahmud. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah*. Accounting Analysis Journal. Universitas Negeri Semarang.
- Indrianto, N., & Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM
- Jensen, M., & Meckling W. 1976. *Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure*. Journal of Financial Economics.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
- Laswad, F., Fisher, R., Oyerele, P. 2005. *Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities*. ELSEVIER
- Martinsen, D. S. & Beg Jorgensen T. 2010. *Accountability as a differentiated value in supranational governance*, The American Review of Public Administration, 40(6), pp. 742-760, doi: 10.1177/0275074010366300
- Medina, F. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia*. Depok: Universitas Indonesia.
- Munoz, L. A., & Bolivar, M. P. 2015. *Determining Factors of Transparency and Accountability in Local Governments: A Meta Analytic Study*. Lex Localis
- Mustofa, Anies Iqbal. *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. Accounting Analysis Journal. Vol. 1 no. 1.(2012). h. 1-6
- Nainggolan, Agus Tubels dan Dyah Purwanti. 2016. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan daerah via website*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 2016.
- Pratama, Kadek Aris Dwi., Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. 2015. *Pengaruh Kompleksita Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No.1 Tahun 2015.
- Pitman, M.K., & Groff, J. E. (2004). *Municipal Financial Reporting on the World Wide Web: A Survey of Financial Data Displayed on The Official Websites of The 100 Largest U.S Municipalities*. Journal of Government Financial Management.
- Puspita, Rora., & Dwi Martani 2012. *Analisis pengaruh kinerja dan kualitas pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda*. Universitas Indonesia
- Rohman, Abdul. *Aksesibilitas, Penyajian dan Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi pada Kota dan Kabupaten Tegal)*. Jurnal Akuntansi. Tahun XIII. No.03, September 2009. Hal 252-264
- Serrano, Carlos. Mar. Rueda. Pilar, Portillo. 2008. *Factors influencing e-disclosure in local public administrations*. Dteconz, Vol. 3. 2008, Zaragoza, Spanyol.
- Setyaningrum, Dyah & Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9, No.2 Tahun 2012.
- Sinaga, Yurisca Febriyanty. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan laporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*. Skripsi. FEB UNDIP. Semarang.
- Style, A. K., & Tennyson, M. 2007. *The accessibility of financial reporting of u.s municipalities on the internet*. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, Mya Dewi & Komarudin, Achmad. 2014. *Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet*. Jurnal Brawijaya.
- Undang-undang Republik Indonesia 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Pajak Keterbukaan Informasi Publik.
- Waliyyani, Ghaniyyu Mintotik & Amir Mahmud. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, Volume 4, No.2 Tahun 2015.



**Lampiran 1**  
**Hasil Analisis Data**  
**Model 1 Pengungkapan Informasi Keuangan Daerah**  
**Menilai -2 Log Likelihood**

**Omnibus Tests of Model Coefficients**

	Chi-square	Df	Sig.
Step	49,808	6	,000
Step 1 Block	49,808	6	,000
Model	49,808	6	,000

**Nilai Koefisien Determinasi Model**

**Model Summary**

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	145,660 <sup>a</sup>	,298	,397

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

**Hasil Uji Homes and Lemeshow Test**

**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	3,157	8	,924

**Menilai Akurasi Model**

**Classification Table<sup>a</sup>**

	Observed	Predicted		
		pengungkapanIKD		Percentage Correct
		Tidak ada pengungkapan IKD	Ada pengungkapan IKD	
Step 1	Tidak ada pengungkapan IKD	108	1	99,1
	Ada pengungkapan IKD	30	2	6,3
	Overall Percentage			78,0

a. The cut value is ,500

**Hasil Model Regresi yang Dihasilkan**

**Variables in the Equation**

	B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)		
							Lower	Upper	
Step 1 <sup>a</sup>	PAD	3,389	3,875	,765	1	,382	29,634	,015	58947,470
	UP	,727	,707	1,057	1	,304	2,070	,517	8,280
	KP	,000	,000	,697	1	,404	1,000	1,000	1,000
	BD	-1,872	1,663	1,267	1	,260	,154	,006	4,006

RPU	,035	,079	,194	1	,660	1,035	,887	1,208
KLK(1)	,256	,415	,382	1	,537	1,292	,573	2,913

a. Variable(s) entered on step 1: PAD, UP, KP, BD, RPU, KLK.

## Lampiran 2

### Model 2 Aksesibilitas Informasi Keuangan Daerah

#### Uji Normalitas

##### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		141
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,36636958
Most Extreme Differences	Absolute	,102
	Positive	,102
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		1,216
Asymp. Sig. (2-tailed)		,104

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Uji R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi)

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,315 <sup>a</sup>	,099	,059	,37848

a. Predictors: (Constant), KLK, UP, RPU, KP, PAD, BD

b. Dependent Variable: Akses1

### Uji F-Test (Uji Signifikan Serentak)

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,115	6	,353	2,461	,027 <sup>b</sup>
	Residual	19,195	134	,143		
	Total	21,310	140			

a. Dependent Variable: Akses1

b. Predictors: (Constant), KLK, UP, RPU, KP, PAD, BD

### Uji Multikolinearitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	7,171	3,182		2,254	,026		
	PAD	,025	,663	,004	,038	,970	,578	1,729
	UP	3,716E-007	,000	,350	2,535	,012	,353	2,832
	KP	-,082	,115	-,103	-,714	,476	,325	3,081
	BD	-,311	,367	-,145	-,848	,398	,230	4,357
	RPU	-,005	,013	-,035	-,409	,683	,941	1,063
	KLK	-,122	,066	-,157	-1,842	,068	,924	1,083

a. Dependent Variable: Akses1

### Uji Heteroskedastisitas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-1,703	2,133		-,798	,426
	PAD	-,307	,444	-,078	-,691	,491
	UP	6,679E-009	,000	,010	,068	,946
	KP	-,026	,077	-,050	-,331	,741
	BD	,228	,246	,166	,928	,355
	RPU	-,001	,009	-,013	-,151	,880
	KLK	-,038	,045	-,077	-,864	,389

a. Dependent Variable: RES\_3

### Hasil Uji Regresi Berganda

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7,171	3,182		2,254	,026
PAD	,025	,663	,004	,038	,970
UP	3,716E-007	,000	,350	2,535	,012
1 KP	-,082	,115	-,103	-,714	,476
BD	-,311	,367	-,145	-,848	,398
RPU	-,005	,013	-,035	-,409	,683
KLK	-,122	,066	-,157	-1,842	,068

a. Dependent Variable: Akses1